

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian global saat ini masih belum stabil, yang diperkirakan akan tetap berpengaruh terhadap kondisi ekonomi domestik Indonesia secara umum maupun Kabupaten Malang secara khusus. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelambatan ekonomi global dan perlu diwaspadai antara lain pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, kebijakan moneter AS terkait kenaikan suku bunga, kebijakan devaluasi yuan Tiongkok, turunnya harga minyak dunia, menurunnya harga komoditas ekspor, tingginya tuntutan produk ekspor yang berwawasan lingkungan serta ketergantungan bahan baku impor industry manufaktur dan produk konsumsi masyarakat.

Kerjasama regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai 1 Januari 2016 juga perlu menjadi perhatian bagi perekonomian Kabupaten Malang khususnya terhadap kegiatan investasi dan pengembangan UMKM. Dengan dimulainya MEA, pada satu sisi merupakan peluang karena pasar semakin terbuka namun pada sisi lain merupakan tantangan yang berimplikasi pada terbukanya arus barang dan jasa, modal, tenaga kerja dan teknologi antar negara ASEAN.

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-program pembangunan daerah dengan melihat kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Jawa Timur seperti sekarang ini hendaknya diutamakan untuk lebih menguatkan dan mengembangkan perekonomian daerah yang dilengkapi dengan kondisi pelayanan publik dan infrastruktur yang semakin baik untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Sesuai dengan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2020, pada tahap ke-3 (Tahun 2016-2020) dengan arah pembangunan adalah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi SWP guna

memperkecil kesenjangan antar kawasan; meningkatkan kualitas pelayanan publik; meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya; meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri; mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup; mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan; meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, maka kebijakan umum pembangunan Kabupaten Malang tahun 2017 adalah: 1) mengembangkan potensi ekonomi yang ada untuk sebesar-besarnya mendukung kesejahteraan masyarakat seperti pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, dan pariwisata; 2) memberdayakan masyarakat perdesaan dalam upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran; 3) Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata sebagai sektor yang menunjang ekonomi masyarakat perdesaan; 4) Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan produk lulusan pendidikan; 5) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara profesional dan berkualitas; 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelembagaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan; 7) Pengembangan sentra-sentra produksi pertanian unggulan sebagai penunjang agribisnis dan agroindustri; 8) Meningkatkan reformasi birokrasi dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 9) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi dan kemasyarakatan; 10) Peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam.

3.1.1. Kondisi Perekonomian Tahun 2015 dan Target Tahun 2016

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang perlu diupayakan identifikasi sektor-sektor yang merupakan unggulan dan memberikan dampak bagi sektor sektor lain yang belum berkembang. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Malang telah mengalami banyak kemajuan dan perubahan, pembangunan ekonomi yang selama ini berjalan telah mampu menciptakan berbagai aktivitas ekonomi dan kenaikan pendapatan masyarakat. Perkembangan Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
**Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malang**

No	KATEGORI	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,49	18,16	18,09	18,16	18,00	18,18
2	Pertambangan dan Penggalian	2,34	2,17	2,07	2,10	2,04	2,14
3	Industri Pengolahan	29,66	29,91	29,55	29,97	30,19	29,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
6	Konstruksi	11,42	12,03	12,43	12,64	12,60	12,22
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,37	18,99	18,99	18,50	18,53	18,87
8	Transportasi dan Pergudangan	1,00	1,02	1,09	1,14	1,15	1,08
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,10	3,12	3,05	3,09	3,17	3,11
10	Informasi dan Komunikasi	4,17	4,19	4,21	4,01	3,97	4,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,48	1,59	1,70	1,71	1,71	1,64
12	Real Estate	1,44	1,38	1,38	1,31	1,35	1,37
13	Jasa Perusahaan	0,35	0,34	0,35	0,36	0,36	0,35
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,09	2,08	2,06	1,94	1,90	2,01
15	Jasa Pendidikan	2,27	2,33	2,41	2,43	2,40	2,37
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,52	0,53	0,55	0,57	0,56	0,55
17	Jasa lainnya	2,11	1,95	1,90	1,89	1,90	1,95

Sumber: BPS data diolah

Aktifitas ekonomi di Kabupaten Malang tidak terlepas dari aktifitas masyarakat dalam masing-masing sektor ekonomi produktif yang ada di Kabupaten Malang. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi paling tinggi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah industri pengolahan dengan rata-rata sebesar 29,34%, disusul perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 19,29%, pertanian, kehutanan, dan perikanan 17,99% dan konstruksi sebesar 11,77%. Industri pengolahan menjadi sektor yang dominan dikarenakan Kabupaten Malang dengan basis pertanian mulai mengalami pergeseran pada produk-produk olahan pertanian yaitu industri makanan dan minuman serta pengolahan tembakau. Dilihat dari sisi pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selama kurun 5 tahun mengalami flutuasi dan cenderung menurun namun dilain sisi sektor industri pengolahan mengalami kecenderungan meningkat walaupun berfluktuasi. Dengan demikian sektor pertanian yang merupakan basis Kabupaten Malang merupakan andalan dimana setiap tahunnya mengalami

surplus komoditas pangan. Perkembangan Struktur PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Perkembangan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malang pada Tabel 3.3

Tabel 3.2
**Struktur PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malang**

No	KATEGORI	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,65	18,46	18,01	17,55	17,27	17,99
2	Pertambangan dan Penggalian	2,38	2,25	2,17	2,09	2,04	2,18
3	Industri Pengolahan	29,33	29,19	28,81	29,59	29,78	29,34
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
6	Konstruksi	11,29	11,59	12,00	12,03	11,96	11,77
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,32	19,31	19,43	19,16	19,24	19,29
8	Transportasi dan Pergudangan	1,01	1,03	1,08	1,09	1,10	1,06
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,16	3,18	3,17	3,18	3,22	3,18
10	Informasi dan Komunikasi	4,31	4,49	4,75	4,79	4,85	4,64
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,46	1,51	1,60	1,62	1,63	1,56
12	Real Estate	1,44	1,43	1,44	1,44	1,44	1,44
13	Jasa Perusahaan	0,35	0,35	0,35	0,36	0,37	0,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,11	2,02	1,95	1,86	1,85	1,96
15	Jasa Pendidikan	2,28	2,32	2,36	2,39	2,43	2,36
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,54	0,55	0,57	0,58	0,59	0,56
17	Jasa lainnya	2,17	2,11	2,09	2,07	2,05	2,10

Sumber: BPS data diolah

Tabel 3.3
**Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malang**

No	KATEGORI	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,9	5,7	3,1	3,0	3,8
2	Pertambangan dan Penggalian	4,4	1,1	1,9	1,8	2,9
3	Industri Pengolahan	5,3	6,3	4,2	8,5	6,2
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,1	10,3	5,1	0,2	(1,2)
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,6	4,4	6,6	1,9	5,7
6	Konstruksi	9,4	9,5	9,4	5,9	4,9
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,9	6,7	6,2	4,2	6,0
8	Transportasi dan Pergudangan	8,6	9,1	9,9	6,9	6,6
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,1	7,7	5,2	6,0	6,7
10	Informasi dan Komunikasi	11,0	11,1	11,8	6,7	6,8
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,8	10,9	11,9	6,8	5,8

No	KATEGORI	2011	2012	2013	2014	2015
12	Real Estate	5,8	6,0	6,1	5,7	6,0
13	Jasa Perusahaan	5,8	5,0	6,8	9,5	8,5
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,5	2,6	1,9	0,9	4,7
15	Jasa Pendidikan	7,4	8,3	7,7	7,0	7,2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,5	8,9	8,7	8,1	6,7
17	Jasa lainnya	5,0	3,6	4,8	4,4	4,5
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,6	6,8	5,6	5,7	5,5

Sumber: BPS data diolah

Indikator makro lainnya yaitu Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) tahun 2015 sebesar Rp.73.983.654,9 juta tahun 2016 ditargetkan menjadi sebesar Rp.82.882.939 juta. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) tahun 2015 sebesar Rp. 55.457.752,2 juta dan tahun 2016 ditargetkan menjadi sebesar Rp.58.834.810 juta. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2015 sebesar 5,54%, tahun 2016 ditargetkan sebesar 5,86%-6,09%. Laju Inflasi tahun 2015 sebesar 6,26% dan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 5,60%-6,01%. Pendapatan Perkapita ADHB tahun 2015 sebesar Rp.29.078.185,- dan tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp.32.367.614,-

3.1.2. Isu Strategis 2017 – 2018

Beberapa Isu strategis utama untuk tahun 2017-2018 yang sudah mengemuka baik yang berskala global, nasional, maupun regional Jawa Timur dan Kabupaten Malang antara lain:

1. Isu berskala global:

Gejolak perekonomian global yang saat ini masih mengemuka yaitu adanya ketidakpastian kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika “*Federal Reserve*” atau dikenal dengan *The Fed*, pelemahan nilai rupiah terhadap US\$, penurunan harga minyak dunia, isue global tersebut masih akan tetap mewarnai kondisi makro ekonomi nasional dan daerah.

2. Isu berskala nasional:

a. Kesiapan negara Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan regional di Asia juga menjadi tantangan yang harus disikapi dengan serius bagi daerah, meningkatnya distribusi barang-barang ke

dalam negeri yang lebih kompetitif serta dampak dari non tarif beberapa komoditi yang masuk akan meningkatkan persaingan produk sejenis yang dihasilnya daerah. Oleh karenanya perlu adanya upaya dari negara ataupun daerah untuk melakukan langkah-langkah kebijakan dalam upaya proteksi terhadap komoditi yang dihasilkan daerah agar bisa bersaing dengan produk daerah ataupun negara lain;

- b. Konektivitas wilayah, yang menitikberatkan pada keterkaitan (konektivitas) wilayah memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah;
 - c. Kedaulatan Pangan, yang menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - d. Energi, yang memfokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar energi listrik, dalam tahun 2015–2019 direncanakanakan dibangun pembangkit listrik guna meningkatkan kemandirian energi.
3. Isu berskala regional Jawa Timur:
- a. Belum meratanya akses mutu layanan pendidikan di semua jenjang pendidikan dan masih rendahnya Angka Partipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan menengah;
 - b. Masih besarnya angka kemiskinan dan Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi;
 - c. Masih lemahnya penguasaan teknologi pertanian, serta terbatasnya sarana-prasarana pengelolaan pasca panen hasil produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - d. Lemahnya kelembagaan, akses pasar dan akses modal para pelaku UMKM dan masih banyaknya IKM yang belum Terstandarisasi;
 - e. Rendahnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni, air bersih, dan sanitasi;
 - f. Tingginya tingkat pencemaran lingkungan pada media air dan tanah;

- g. Belum adanya ketentuan teknis pelaksanaan regulasi undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
 - h. Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara sehingga rawan Konflik sosial dimasyarakat;
 - i. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan melalui *e-Government*;
 - j. Kurangnya aktualisasi, fasilitasi dalam pelestarian budaya daerah.
4. Isu berskala lokal Kabupaten Malang:
- a. Sebagai daerah agraris perekonomian Kabupaten Malang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim yang ekstrem dan lingkungan yang tidak stabil dan masih didominasi oleh produk pertanian primer;
 - b. Penyediaan infrastruktur pekerjaan umum yang berorientasi kepuasan pengguna berbasis kualitas, tidak lagi cukup hanya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetapi juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial dan inklusif;
 - c. Peningkatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penambahan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dengan mengedepankan penanaman nilai keagamaan yang toleran dan budaya luhur, serta pembiayaan pendidikan yang murah;
 - d. Peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kompetensi tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Malang khususnya, kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus;
 - e. Perlunya peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah baik dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya sebagai upaya Peningkatan layanan

- publik melalui reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik;
- f. Peningkatan sumber daya manusia aparatur desa terkait implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - g. Angka kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi;
 - h. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun perlu dilakukan pengendalian pencemaran limbah, peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemenuhan RTH Publik minimal dan penegakan hukum secara konsisten;
 - i. Perlunya percepatan pengembangan pariwisata melalui penciptaan ragam paket wisata, pengembangan jalur wisata, mendorong pendirian sarana dan prasarana penunjang wisata seperti hotel, penginapan dan restoran serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata.

3.1.3. Analisis Lingkungan

1. Kekuatan

- a. Letak geografi Kabupaten Malang yang strategis berikut penetapan kelembagaan tata ruang wilayah yang teratur dan konsisten;
- b. Kelengkapan sarana perhubungan, baik darat, laut, maupun udara sehingga memberi kemudahan dalam mobilisasi orang dan distribusi barang;
- c. Potensi sumber daya alam yang melimpah, berupa pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan;
- d. Pengembangan kelembagaan kepariwisataan telah mampu meningkatkan jumlah destinasi wisata dan kunjungan wisatawan;
- e. Sektor industri dan jasa mulai berkembang sehingga mendorong ekonomi kawasan;
- f. Tersedia sumber daya manusia usia angkatan kerja yang cukup besar.

2. Kelemahan

- a. Produktifitas hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai andalan masih belum optimal dan potensi wisata belum dikelola secara optimal;
- b. Kualitas infrastruktur, baik kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan perumahan rakyat belum optimal;
- c. Kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai menjadi salah satu penyebab produk kebijakan pemerintah yang kurang efektif;
- d. Penduduk miskin dan pengangguran masih cukup banyak;
- e. Kebanyakan usaha ekonomi rakyat merupakan usaha non formal, sehingga seringkali mengalami kesulitan untuk mengakses permodalan dari lembaga perbankan maupun program-program penguatan ekonomi rakyat lainnya yang membutuhkan aspek legal formal, padahal sektor usaha ekonomi rakyat tersebut merupakan salah satu pilar ekonomi Kabupaten Malang;
- f. Kondisi fisiografis, demografis dan geologis wilayah mempunyai berbagai potensi bencana alam berupa tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gempa bumi, puting beliung dan angin rebut.
- g. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih relatif rendah, sehingga daya dukung lingkungannya menjadi rendah, disamping itu kondisi kesehatan lingkungan perlu banyak pembenahan, terutama dalam hal penanganan sampah, air bersih, sanitasi dan polusi;

3. Peluang

- a. Gagasan Revolusi Mental berkorelasi dengan upaya memajukan kualitas sumber daya manusia;
- b. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dibidang kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/perumahan rakyat dan energi yang terus-menerus diinisiasi oleh pemerintah pusat;
- c. Adanya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui strategi kebijakan yang terintegratif, meliputi

program perlindungan sosial, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar Pemberdayaan masyarakat, dan Pembangunan yang inklusif;

- d. Kebijakan Otonomi Desa berikut transfer Dana Desa (DD) turut memacu akslerasi pembangunan wilayah dan keberdayaan masyarakat di pedesaan;
- e. Pendampingan yang intensif implementasi reformasi birokrasi oleh Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi maupun organisasi non pemerintah lainnya;
- f. Terbukanya peluang kerjasama kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah baik antar daerah di dalam maupun di luar negeri;
- g. Peluang investasi pada sektor industri manufaktur, olahan dan sektor jasa masih terbuka.

4. Ancaman

- a. Penerapan pasar bebas merupakan ancaman bagi dunia usaha, terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak memiliki daya saing terhadap produk-produk luar negeri;
- b. Situasi perekonomian dunia yang sering kali berdampak negatif bagi perekonomian daerah perlu disikapi dengan penguatan struktur perekonomian yang berbasis lokal dan penguatan ketahanan pangan masyarakat;
- c. Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang mengikuti harga keekonomian memicu instabilitas harga komoditas dan tingginya biaya distribusi barang;
- d. Angka pertumbuhan penduduk masih tinggi sehingga perlu peningkatan kualitas keluarga dan pemasyarakatan kembali norma keluarga sejahtera;
- e. Lingkungan hidup yang rusak dan perubahan iklim yang tidak harmonis perlu terus ditangani dan dikelola secara berkelanjutan;
- f. Angka kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berfluktuatif serta potensi ancaman SARA terkadang masih ada.

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2017-2018

Tantangan dalam pembangunan perekonomian Tahun 2017-2018 diperkirakan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan MEA yang akan berdampak pada dinamika kegiatan ekonomi Kabupaten Malang, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
2. Ketergantungan bahan baku impor pada industri manufaktur dan kebutuhan pangan masyarakat;
3. Fluktuasi harga BBM yang menyebabkan ketidakpastian dalam ekspektasi dunia usaha;
4. Koordinasi yang belum optimal antar sektor;
5. Masih rendahnya kualitas SDM mengakibatkan daya saing yang rendah;
6. Makin ketatnya persaingan global dan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar lokal dan daya saing produk daerah;
7. Infrastruktur terutama jalan, jembatan belum memadai bagi pengembangan investasi baik dibidang industri dan perdagangan maupun pariwisata;
8. Pertumbuhan ekonomi masih lamban sesuai dengan karakter perekonomian berbasis pertanian primer;
9. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam lokal;
10. Kondisi alam dan lingkungan yang rusak dan iklim yang ekstrem berpengaruh kepada usaha pertanian sebagai basis perekonomian Kabupaten Malang;
11. Pelayanan publik dirasakan belum memuaskan dan sumber pembiayaan masih sangat terbatas serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
12. Sarana dan prasarana perekonomian dan pariwisata masih perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Malang Tahun 2015 dan perkiraan 2016, maka prospek perekonomian Tahun 2017-2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PDRB ADHB pada tahun 2017 diprediksi akan menjadi Rp.92.518.330 juta dan tahun 2018 meningkat menjadi Rp.101.241.728 juta;

2. PDRB ADHK pada tahun 2017 diprediksi menjadi Rp.62.506.102 juta dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.66.562.748 juta;
3. Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan akan tetap mengalami perbaikan yaitu diperkirakan tumbuh hingga 6,24% - 6,41% dan tahun 2018 tumbuh hingga 6,49% - 6,58%;
4. Inflasi tahun 2017 diperkirakan sekitar 5,07%-5,58% dan pada Tahun 2018 inflasi diprediksi sebesar 4,96%-5,05%;
5. Pendapatan Perkapita ADHB pada tahun 2017 diprediksi sebesar Rp.35.907.193,- dan tahun 2018 menjadi sebesar Rp.39.898.851,-.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Malang difokuskan pada upaya penggalan PAD secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan beban bagi masyarakat. Selain itu, upaya peningkatan dana perimbangan perlu terus menerus diusahakan. Mengembangkan pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Malang merupakan usaha lain yang terus digerakkan untuk memperbesar struktur pendapatan daerah.

Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang diarahkan pada :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah berbasis pada pemanfaatan Teknologi Informasi yang modern dan didukung kapasitas Sumber Daya Manusia yang professional;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil dan Pihak Swasta;
4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
6. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
8. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
9. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat;

Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut ditempuh melalui upaya penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel; menginven- tarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar

dapat memberi kontribusi pada PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain. Secara rinci perkembangan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 s/d Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4

**Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 s/d Tahun 2017**

NO	URAIAN	REALISASI			TARGET TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015*		
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	2.529.685.862.152	3.058.671.277.833	3.471.200.775.817	3.536.225.186.505	3.576.745.272.289
1.1	Pendapatan Asli Daerah	262.267.260.454	411.185.107.107	461.807.474.031	394.872.007.214	429.171.337.867
1.1.1	Pajak Daerah	95.918.841.193	153.924.838.046	170.108.822.450	147.710.000.000	162.400.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	45.314.153.759	51.905.681.732	40.403.196.760	31.869.042.010	44.017.211.243
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.007.868.773	12.670.468.248	18.340.914.239	13.984.704.213	15.009.910.688
1.1.4	Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah	109.026.396.729	192.684.119.081	232.954.540.582	201.308.260.991	207.744.215.936
1.2.	Dana Perimbangan	1.700.485.365.220	1.831.998.927.025	1.893.231.262.923	2.497.773.079.760	2.490.841.750.760
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	148.938.981.220	129.756.776.025	126.719.045.923	135.695.710.000	147.324.654.000
1.2.2	Dana Alokasi umum	1.439.234.034.000	1.572.191.571.000	1.613.161.777.000	1.694.884.660.000	1.694.884.660.000
1.2.3	Dana Alokasi khusus	112.312.350.000	130.050.580.000	153.350.440.000	667.192.709.760	648.632.436.760
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	566.933.236.477	815.487.243.701	1.116.162.038.863	643.580.099.531	656.732.183.662
1.3.1	Hibah	-	949.656.000	19.994.558.900	25.250.000.000	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Dari Provinsi	127.284.469.477	206.032.406.701	213.897.330.963	235.124.762.031	273.526.846.162
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	370.878.002.000	452.738.931.000	581.206.056.000	285.647.131.000	285.647.131.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	68.770.765.000	155.766.250.000	301.064.093.000	97.558.206.500	97.558.206.500

Keterangan: *) unaudited BPK

Sumber : DPPKA

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan

kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif.

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Malang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
4. Pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana;
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup serta upaya pengentasan kemiskinan;
6. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata;
7. Memenuhi komitmen kerjasama/kemitraan pembangunan dan pembiayaan;
8. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten

Malang. Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 s/d Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5

**Realisasi, Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 s/d Tahun 2017**

NO	URAIAN	REALISASI			PLAFON TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015*		
1	2	4	5	5	6	7
2	BELANJA DAERAH	2.440.509.395.392	2.864.314.173.736	3.538.276.305.822	3.573.478.820.394	3.670.745.272.289
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.511.241.974.353	1.629.572.341.704	1.844.417.080.236	2.117.490.035.813	2.140.418.646.001
2.1.1	Belanja Pegawai	1.239.250.421.797	1.381.411.861.626	1.403.342.366.775	1.565.333.020.937	1.618.435.658.625
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	85.708.808.180	115.434.068.600	96.318.501.178	52.499.577.000	51.920.331.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	66.234.873.200	15.115.149.000	20.105.658.000	19.475.150.000	19.475.150.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab/Kota dan Pemdes	14.631.182.317	15.303.673.890	30.630.076.536	45.125.294.500	15.530.511.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keu. Kpd Prov./Kab/Kota dan Pemdes	705.400.227	769.032.588	288.968.291.977	430.056.993.376	430.056.995.376
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.695.673.632	2.499.375.000	5.052.185.770	5.000.000.000	5.000.000.000
2.1.9	Belanja transfer bantuan keuangan ke desa	103.015.615.000	99.039.181.000	-	-	-
2.2	Belanja Langsung	929.267.421.039	1.234.741.832.032	1.693.859.225.586	1.455.988.784.581	1.530.326.626.288
2.2.1	Belanja Pegawai	87.198.262.349	118.220.239.768	163.203.501.885	163.071.657.136	152.241.146.590
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	405.567.656.162	615.017.918.830	816.558.658.477	668.326.248.489	717.578.253.257
2.2.3	Belanja Modal	436.501.502.528	501.503.673.434	714.097.065.223	624.590.878.956	660.507.226.441

Keterangan: *) unaudited BPK

Sumber : DPPKA

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan

kondisi keuangan daerah. Adapun arah kebijakan penerimaan pembiayaan sebagai berikut:

1. Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah;
2. SiLPA diproyeksikan tidak lebih ketentuan perundangan, namun demikian tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah;
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah

obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat;

5. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi: Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, dan dana bergulir (kredit program). Secara rinci perkembangan realisasi, target dan proyeksi pembiayaan daerah kabupaten malang tahun 2013 s/d tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6

**Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2013 s/d Tahun 2017**

NO	URAIAN PENDANAAN	RELISASI			TARGET TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015		
1	2	4	5	5	6	7
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	123.134.944.547	217.172.991.116	427.161.196.273	195.382.849.725	100.000.000.000
3.1.1	SiLPA	123.124.944.547	194.440.358.299	390.957.110.051	195.382.849.725	100.000.000.000
3.1.2	Pencairan Dana cadangan	-	22.732.632.818	36.204.086.222	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan daerah	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali pemberian pinjaman	10.000.000	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	17.694.629.139	20.572.985.162	8.111.913.987	31.000.000.000	6.000.000.000
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	16.694.629.139	19.572.985.162	1.515.584.449	-	5.000.000.000

NO	URAIAN PENDANAAN	RELISASI			TARGET TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015		
1	2	4	5	5	6	7
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	-	-	5.596.329.538	30.000.000.000	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Pembiayaan Netto		105.440.315.408	196.600.005.954	419.049.282.286	164.382.849.725	94.000.000.000

Keterangan: *) unaudited BPK

Sumber : DPPKA